

ANALYSIS OF THE FACTORS FOR CHANGING THE FOREIGN POLICY OF BRITISH IMMIGRATION TO A POINTS-BASED IMMIGRATION SYSTEM

Tina Adelia Lestari¹⁾, Firsty Chintya Laksmi Perbawani²⁾*

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur-Indonesia

Corresponding author: firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the reasons why the UK changed its immigration foreign policy. This study will explain the factors that drove the change in UK immigration policy to the Points-Based Immigration System. The research method used in this study is explanatory qualitative. This article is compiled by collecting data from books, journal articles, official government websites, and credible articles related to the topic being analyzed. After officially leaving the European Union, the UK stopped the Free Movement policy and replaced it with a new immigration policy based on points, namely the Points-Based Immigration System. This new policy, which is stricter and under the full control of the British government, is expected to reduce the high number of immigrants in the UK. After being bound by EU policies for so long, the UK is finally free to implement its own policies that are in accordance with its national interests. The findings show that changes in UK immigration foreign policy are driven by domestic factors in the form of bureaucracy, public opinion, media, interest groups, and political parties, as well as international factors in the form of global factors, regional factors, bilateral relations, and non-state actors.

Keywords: *Factor Analysis, Foreign Policy, UK Immigration, Points Based*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Inggris melakukan perubahan kebijakan luar negeri imigrasinya. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Artikel ini disusun dengan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, *website* resmi pemerintah, dan artikel kredibel yang berkaitan dengan topik yang dianalisis. Setelah secara resmi keluar dari Uni Eropa, Inggris menghentikan kebijakan *Free Movement* dan menggantinya dengan kebijakan imigrasi baru berbasis poin yaitu *Points-Based Immigration System*. Kebijakan baru yang lebih ketat dan dalam kendali penuh pemerintah Inggris ini, diharapkan dapat mengurangi tingginya angka imigran di Inggris. Setelah sekian lama terikat kebijakan dari Uni Eropa, Inggris akhirnya bisa bebas untuk menerapkannya sendiri yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris didorong oleh faktor domestik berupa birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik, serta faktor internasional berupa faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara.

Kata Kunci: Analisis Faktor, Kebijakan Luar Negeri, Imigrasi Inggris, Berbasis Poin

Pendahuluan

Perubahan kebijakan luar negeri merupakan respons negara terhadap berbagai tantangan dan peluang yang muncul di lingkungan internasional. Transformasi kebijakan luar negeri dibutuhkan seiring dengan perubahan kondisi global yang bersifat eksternal maupun internal. Dalam hal ini, salah satu aspek krusial negara dalam menentukan arah dan strategi di ranah internasional adalah bidang imigrasi. Imigrasi merupakan proses perpindahan seseorang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk tinggal menetap di negara yang dituju. Orang yang melakukan imigrasi disebut dengan imigran, dan imigran tersebut bukan merupakan warga negara dari negara tujuan (Bidarti, 2020). Imigrasi sendiri menurut istilah berasal dari kata latin “*migration*” yang memiliki arti perpindahan dari suatu negara ke negara lain (Bidarti, 2020).

Imigrasi mampu menjadi isu dalam suatu negara. Ketika terjadi peningkatan jumlah kedatangan imigran dalam waktu singkat, hal ini memengaruhi bagaimana masyarakat memandang pentingnya isu imigrasi. Lonjakan imigrasi membuat masyarakat dalam negeri lebih memperhatikan isu ini dan menganggapnya sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan publik. Selain itu, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang imigrasi. Cara media melaporkan isu ini dapat memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap imigrasi. Contohnya, di Inggris, perhatian media terhadap imigrasi meningkat sejak perluasan Uni Eropa pada tahun 2004, yang membuat isu ini semakin menonjol (Hangartner & Spirig, 2024). Maka dari itu, peraturan imigrasi merupakan alat penting bagi negara untuk mengelola arus orang asing, melindungi kepentingan nasional, dan menjaga stabilitas serta keamanan di dalam negeri. Setiap negara berhak mengatur sistem imigrasi negaranya sendiri, tak terkecuali Inggris. Namun, hal tersebut tak sepenuhnya berlaku saat Inggris masih tergabung dalam keanggotaan UE.

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara-negara di Eropa (The European Union, 2025). UE dibentuk dengan tujuan inti untuk saling membantu dalam mewujudkan perekonomian, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat Eropa (Yurisman, 2024). Gagasan untuk membentuk UE tercipta setelah perang dunia II yang merugikan banyak negara saat itu. Pada awal pembentukannya, UE hanya beranggotakan enam negara yang saling bekerja sama yaitu Perancis, Italia, Belanda, Jerman, Belgia, dan Luksemburg (The European Union, 2025). Inggris pada mulanya tidak tergabung dalam UE, namun, pasca Perang Dunia II Inggris mengalami berbagai masalah termasuk sektor ekonominya. Inggris kemudian bergabung dalam keanggotaan UE dengan maksud untuk

memulihkan perekonomiannya melalui keuntungan kerja sama ekonomi yang didapat dalam UE (Yurisman, 2024). Setelah bergabung menjadi anggota UE, Inggris diharuskan untuk melakukan langkah penyesuaian terhadap segala kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan UE di dalamnya (Alunaza SD, 2018). Semua negara termasuk Inggris wajib menerapkan kebijakan yang ditetapkan dan telah disetujui oleh negara-negara anggota UE.

Saat masih tergabung dalam UE, sistem imigrasi Inggris terikat dengan kebijakan milik UE yaitu kebijakan *Free Movement*. Kebijakan *Free Movement* merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh UE untuk memudahkan masyarakat Eropa dalam bergerak dan berpindah dengan bebas dari satu negara ke negara lain (The European Union, 2025). Kebijakan *Free Movement* mengizinkan seluruh warga negara dari UE untuk berkunjung, bekerja, belajar, serta tinggal menetap di negara-negara anggota UE. Selain orang, *Free Movement* juga mengizinkan barang, jasa, atau uang untuk bergerak dan berpindah secara bebas dari satu negara ke negara lain di UE (The European Union, 2025). Melalui kebebasan dan kemudahan yang ada, angka Imigran di Inggris terus bertambah. Imigran termasuk salah satu faktor yang berdampak terhadap perekonomian di Inggris. Imigran yang masuk ke Inggris akan dikenakan pajak khusus yang wajib untuk dibayarkan (Yurisman, 2024). Jumlah pendapatan yang didapat Inggris dari imigran UE mencapai 20 miliar poundsterling dan 5 miliar poundsterling dari imigran non-UE pada tahun 2011 (Yurisman, 2024). Akan tetapi, imigran yang datang dan tinggal menetap di Inggris tidak sepenuhnya membawa dampak yang positif. Timbul permasalahan lain di sektor keamanan, layanan kesehatan, ekonomi, serta pemukiman. Masyarakat Inggris yang turut merasakan berpendapat bahwa tingginya angka Imigran di Inggris tidak sepadan dengan dampak positif yang diberikan Imigran (Yurisman, 2024). Sampai dengan 2016, angka imigran di Inggris mencapai 7,3 juta dimana angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi (Alunaza SD, 2018).

Berbagai peristiwa yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan UE terutama terkait imigrasi dan kedaulatan nasional, sehingga menyebabkan munculnya gerakan untuk keluar dari UE. Keluarnya Inggris dari UE dikenal dengan istilah *Brexit* atau *British Exit*. Pada 23 Juni 2016, terjadi referendum mengenai keanggotaan Inggris di UE yang menghasilkan 52% suara penduduk Inggris memilih untuk meninggalkan UE (Euro News, 2020). Melalui referendum *Brexit* 2016, Inggris akan memberikan hak serta kewenangan untuk menghentikan kebijakan *Free Movement* dan membuat kebijakan imigrasi baru yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional Inggris (Putra, Susanti, & Dewi, 2019).

Pasca *Brexit*, kebijakan luar negeri imigrasi Inggris yang baru disebut dengan *Points-Based Immigration System*. Transformasi kebijakan luar negeri Inggris ini berusaha membentuk ulang kebijakan imigrasinya, menyelaraskan keefektifan untuk menarik individu yang dapat berkontribusi positif bagi ekonomi, masyarakat, dan institusi pendidikan Inggris (Morris, 2025). *Points-Based Immigration System* merupakan kerangka kerja imigrasi yang digunakan oleh Inggris untuk mengelola dan menilai kelayakan individu yang ingin bekerja, belajar, atau menetap di Inggris (Morris, 2025). Dalam implementasinya, *Points-Based Immigration System* memiliki perubahan yang menonjol. Pertama, penilaian pada imigran berbasis poin yang terstruktur. Poin ini diberikan kepada imigran berdasarkan berbagai kualifikasi, seperti keterampilan, latar belakang pendidikan, kemampuan bahasa Inggris, dan faktor-faktor penunjang lain. Kemudian total poin mereka digunakan untuk menentukan kelayakan berbagai jenis visa (Morris, 2025). Kedua adalah persyaratan visa, dengan berakhirnya *Free Movement* mengartikan bahwa mulai 1 Januari 2021, warga negara UE sekarang memerlukan visa untuk bekerja dan belajar di Inggris. Sehingga, persyaratan visa berlaku untuk semua orang dari luar Inggris (kecuali Republik Irlandia) yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris (NHS Employers, 2025). Ketiga yaitu *Employer Sponsorship*. Pengusaha Inggris memerlukan lisensi sponsor untuk mempekerjakan sebagian besar karyawan yang memenuhi syarat dari luar Inggris. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerjaan yang ingin mereka isi memenuhi persyaratan untuk mensponsori visa kerja (GOV UK, 2022). Perubahan kebijakan luar negeri Imigrasi Inggris dari *Free Movement* ke *Points-Based Immigration System* tidak terlepas dari faktor-faktor dari lingkungan internal atau domestik dan eksternal atau internasional, yang berhasil memengaruhi pandangan para pembuat kebijakan.

Tinjauan Pustaka

Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis. Penelitian yang pertama berjudul “Perubahan Kebijakan Imigrasi Open Door menjadi Kebijakan Point Based System Inggris di Tahun 2016-2023” oleh Heryanda Yurisman yang menganalisis bagaimana Inggris memutuskan untuk merubah kebijakan imigrasi mereka dan dikaji melalui teori *Policy Cycle* oleh Laswell. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai proses pembentukan kebijakan melalui lima tahapan menggunakan teori dari *Policy Cycle* yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *decision making*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Pada tahap pertama agenda mengenai masalah imigran yang telah menjadi isu penting di Inggris, tahap kedua pemerintah Inggris meminta MAC untuk membuat rancangan kebijakan imigrasi yang baru setelah peristiwa *Brexit*, tahap ketiga rekomendasi kebijakan oleh MAC yang telah ada sejak masa pemerintahan Theresa May akhirnya ditetapkan pada masa pemerintahan Boris Johnson, tahap keempat penetapan kebijakan imigrasi yang baru Inggris, dan tahap kelima *stakeholder* melakukan evaluasi pada kebijakan yang baru (Yurisman, 2024). Penelitian kedua berjudul “Pengaruh *British Exit* (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Masalah Imigran” oleh Hardi Alunaza SD dan Virginia Sherin yang menganalisis mengenai pengaruh

Brexit terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait masalah Imigran yang dikaji melalui teori pengambilan keputusan dan imigrasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai urgensi angka imigran yang meningkat bagi Inggris membuat Perdana Menteri Theresa May mengambil keputusan untuk membuat kebijakan untuk menangani masalah imigran yang masuk ke Inggris (Alunaza SD, 2018).

Jeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu belum ada yang mengkaji faktor perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menggunakan teori *Foreign Policy Change*. Penelitian ini membahas mengenai faktor domestik dan faktor internasional Inggris yang berhasil mendorong perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*. Penulis berargumen bahwa alasan Inggris melakukan perubahan kebijakan luar negeri imigrasinya karena faktor domestik birokrasi pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson, opini publik Inggris, media surat kabar Inggris *The Daily Express*, kelompok kepentingan NHS dan CBI, serta peran partai politik Konservatif dan faktor internasional global tingginya angka Imigran dari UE dan negara lain, kondisi regional Inggris, hubungan bilateral Inggris dengan negara lain, serta peran aktor non-negara. Penelitian dalam artikel ini yang berjudul “Faktor Pendorong Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*” menghasilkan sesuatu yang aktual dan menunjukkan sebab-akibat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang menjelaskan mengenai faktor pendorong yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*. Menurut Creswell dalam bukunya yaitu *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* tahun 2014 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel atau fenomena. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi atau mengapa suatu fenomena muncul (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif eksplanatif berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab-akibat mengenai berbagai faktor terkait fenomena yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui *website* pemerintah United-Kingdom (UK), artikel jurnal terkait imigrasi di Inggris, buku, dan *website* internasional yang kredibel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara eksplanatif, yaitu penulis berupaya

untuk menganalisis faktor-faktor sebab-akibat yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan kebijakan imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dari sumber yang kredibel dan terpercaya, menganalisis data, menyusun data, dan mengambil kesimpulan. Penulis memberikan hasil analisis yang mendalam menggunakan teori *Foreign Policy Change* milik Joakim Eidenfalk yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik berperan penting pada perubahan kebijakan luar negeri karena dapat menekan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Adapun lima faktor domestik yang dimaksud yaitu birokrasi, media, opini publik, kelompok kepentingan, dan partai politik. Sementara empat faktor internasional yang dimaksud yaitu faktor global, regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara (Eidenfalk, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Faktor Domestik Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Inggris

Perubahan kebijakan luar negeri tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan melalui proses yang disebabkan oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari segi domestik dan internasionalnya. Perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris juga dipengaruhi dan didorong oleh faktor-faktor domestik maupun internasional.

Faktor domestik yang pertama yaitu birokrasi, di mana peralihan birokrasi dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May menjadi Boris Johnson merupakan titik penting bagi peristiwa *Brexit* dan penetapan perubahan kebijakan imigrasi Inggris. Inggris dapat keluar secara resmi dari keanggotaan UE pada tanggal 31 Januari 2020, di masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson. Wacana yang telah ada sejak pemerintahan Perdana Menteri Theresa May terkait dengan sistem imigrasi baru berbasis poin atau *Points-Based Immigration System* yang diadopsi dari kebijakan milik Australia secara resmi ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021 oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Setelah dilantik, Perdana Menteri Boris Johnson memang mengutamakan kebijakan imigrasi yang baru sebagaimana yang disampaikan dalam pidato pertamanya (The i Paper, 2019). Imigrasi merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keluarnya Inggris dari keanggotaan UE atau *Brexit*. Kebijakan *Free Movement* oleh UE, berpengaruh dalam tingginya angka Imigran yang tinggal dan menetap di

Inggris dari tahun ke tahun. Perdana Menteri Boris Johnson berhasil melanjutkan usaha dari Perdana Menteri terdahulu Theresa May dalam mewujudkan *Brexit* serta menetapkan berbagai kebijakan baru termasuk kebijakan imigrasi Inggris *Points-Based Immigration System* yang tidak terpengaruh oleh UE.

Faktor domestik yang kedua yaitu opini publik, opini masyarakat Inggris terkait masalah imigran bukanlah sesuatu yang asing atau jarang ditemui. Masyarakat Inggris memiliki kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan keamanan yang tidak stabil dengan tingginya angka imigran (Alunaza SD, 2018). Banyaknya jumlah imigran yang tinggal dan menetap di Inggris akan memperkecil tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Inggris. Selain itu, tindak kriminal juga rentan terjadi antara masyarakat Inggris dengan imigran yang tinggal membaaur bersama (Alunaza SD, 2018). Tingginya angka imigran di Inggris akan menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat Inggris terhadap para imigran yang tinggal, bekerja, atau belajar di Inggris. Kegagalan pemerintah Inggris dalam mengurangi angka imigran dari tahun ke tahun juga semakin meningkatkan kegelisahan masyarakat Inggris. Masyarakat Inggris menginginkan kebijakan imigrasi baru yang lebih ketat dan dapat mengurangi tingginya angka imigran di Inggris. Masyarakat Inggris percaya bahwa permasalahan mengenai tingginya angka imigran akan diselesaikan oleh pemerintah setelah Inggris keluar dari UE (Alunaza SD, 2018). Opini masyarakat Inggris juga dapat dilihat melalui survey yang dilakukan oleh *The Migration Observatory* yang menunjukkan bahwa sentimen negatif masyarakat Inggris terhadap imigran menurun setelah *Brexit* (*The Migration Observatory*, 2025). Opini publik atau masyarakat Inggris tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk menghentikan kebijakan *Free Movement* milik UE yang merugikan dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih ketat seperti *Points-Based Immigration System*. Pemerintah akan memegang kendali penuh atas kebijakan *Points-Based Immigration System*, dan akan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat Inggris.

Faktor domestik yang ketiga yaitu media, media memainkan peran penting dalam menyajikan informasi yang dapat menggiring opini publik. Di Inggris sendiri, banyak media surat kabar besar yang namanya sudah mendunia dan memiliki pembaca tidak hanya masyarakat lokal Inggris saja, tetapi juga seluruh masyarakat internasional. Salah satu media yang pro terhadap pemerintah Inggris dan kebijakan imigrasi baru *Points-Based Immigration System* adalah *The Daily Express* atau yang juga dikenal dengan *Express*. *The Daily Express* memiliki rekam jejak dan latar belakang yang cukup berkaitan dengan dunia politik Inggris. Pemilik *The Daily Express* yang pertama ialah Lord Beaverbrook yang merupakan anggota dari

Partai Konservatif saat itu (Spartacus Educational, 2020). Perlu diketahui, bahwa Perdana Menteri Theresa May dan Boris Johnson tergabung dalam Partai Konservatif. Boris Johnson yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri juga menjabat sebagai ketua dari Partai Konservatif. Bukan rahasia umum bahwa media surat kabar *The Daily Express* mendukung Partai Konservatif dalam kepentingannya. *The Daily Express* menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan imigrasi yang baru *Points-Based Immigration System* melalui artikel yang diterbitkan pada laman resmi *The Daily Express*. Artikel yang dimuat *The Daily Express* terkait kebijakan imigrasi yang baru menjelaskan mengenai apa pengertian dari *Points-Based Immigration System*, perubahan apa yang ada, serta bagaimana cara kerja dari *Points-Based Immigration System*. *The Daily Express* yang memiliki pembaca lokal dan internasional menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*.

Faktor domestik yang keempat yaitu kelompok kepentingan NHS dan CBI. *National Health Service* (NHS) adalah badan layanan kesehatan dan salah satu yang terbesar di Inggris. NHS dijalankan menggunakan dana pajak masyarakat Inggris (NHS England, 2025). NHS bertanggungjawab untuk memastikan jumlah tenaga kerja di sektor kesehatan Inggris terpenuhi. NHS yang mementingkan pelayanan untuk masyarakat membutuhkan tenaga kerja ahli atau *skilled worker* untuk menjamin kesejahteraan kesehatan masyarakat Inggris. Pada tahun 2020, sebelum kebijakan imigrasi baru ditetapkan, dunia kesehatan dihadapkan dengan wabah virus *Covid-19* yang menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia termasuk Inggris. Wabah tersebut membuat sektor kesehatan menjadi sektor yang paling diutamakan. Tingginya angka pasien yang terkena virus jauh melebihi ketersediaan tenaga kerja ahli di sektor kesehatan Inggris. NHS mengalami kekurangan dan sangat membutuhkan tenaga kerja ahli yang dapat membantu mengatasi wabah virus *Covid-19* di Inggris. Kebijakan *Points-Based Immigration System* yang mengatur mengenai perekrutan pekerja terampil atau tenaga kerja ahli merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi NHS. Selain itu, visa NHS bagi para imigran juga diatur dan tercantum dalam kebijakan *Points-Based Immigration System* (NHS Employers, 2024).

NHS turut mendukung kebijakan baru dengan memuat *guideline* mengenai kebijakan tersebut serta informasi visa pada laman resmi NHS. Tidak jauh berbeda dengan NHS, *Confederation of British Industry* (CBI) juga membutuhkan tenaga kerja ahli atau pekerja terampil dalam sektor bisnis. CBI merupakan badan yang menaungi 1.100 perusahaan serta memiliki anggota terafiliasi perdagangan sebanyak 150.000 (CBI, 2025). Kebijakan *Points-Based Immigration System* yang mengutamakan dan memperhatikan perekrutan pekerja

terampil akan membawa dampak positif bagi CBI yang membutuhkan tenaga kerja dalam sektor bisnis dan perdagangan. CBI menyatakan bahwa kebijakan *Points-Based Immigration System* memuat pembaruan aturan yang selama ini telah diperjuangkan oleh CBI (CBI, 2020). Adanya dua kelompok kepentingan yang berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi dan kesehatan di Inggris, turut menjadi faktor perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris.

Faktor domestik yang terakhir adalah partai politik Konservatif. Partai Konservatif merupakan partai besar di Inggris yang kerap disebut dengan sayap kanan. Partai Konservatif banyak menghasilkan Perdana Menteri seperti Theresa May dan Boris Johnson. Pada masa pemerintahannya, Perdana Menteri Boris Johnson merupakan ketua dari Partai Konservatif. Boris Johnson bersama dengan Partai Konservatif sangat menginginkan penerapan *Points-Based Immigration System* sebagai kebijakan imigrasi yang baru dan menghentikan kebijakan *Free Movement*. Partai Konservatif mendukung penuh Boris Johnson dalam keputusannya termasuk menjalankan kebijakan imigrasi baru. Melalui *Points-Based Immigration System*, Partai Konservatif memprioritaskan imigran yang bermigrasi ke sektor-sektor utama seperti NHS (Global HR Lawyers, 2020). Visa NHS tersebut akan memudahkan NHS untuk merekrut pekerja terampil dari luar negeri (Stephens Scown, 2021). Dukungan dari Partai Konservatif yang memiliki banyak suara dalam pemerintahan Inggris sudah dipastikan menjadi faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*.

Faktor Internasional Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Inggris

Faktor internasional yang pertama yaitu faktor global, Inggris mengalami *over* populasi imigran dari UE dan negara lainnya. Tingginya angka Imigran menjadi persoalan utama yang dihadapi Inggris dan belum ditemukan solusinya. Inggris terus gagal dalam mengatasi atau menekan angka imigran saat kebijakan *Free Movement* masih dijalankan. Inggris yang terikat dengan kebijakan UE tidak dapat memegang kendali penuh atas perbatasan dan sistem imigrasinya. Selain itu, Inggris juga masih memiliki hubungan kerja sama dengan negara-negara UE lainnya yang memanfaatkan adanya kebijakan *Free Movement*. Pada bulan Maret 2016, angka imigran Inggris mencapai puncaknya. Sebanyak 500.000 warga negara UE berpindah ke Inggris (The Migration Observatory, 2023). Mayoritas masyarakat Inggris menginginkan untuk keluar dan terbebas dari UE melalui hasil dari Referendum *Brexit* 2016. Rencana kebijakan *Points-Based Immigration System* terus didorong oleh Perdana Menteri Boris Johnson dan Partai Konservatif untuk menggantikan *Free Movement*. Faktor global kebijakan imigrasi Inggris yang mengatur arus imigran dari negara-negara lain termasuk UE

membuat Inggris memantapkan keputusannya untuk mengubah kebijakan luar negeri imigrasinya yang lebih ketat dan adil yaitu *Points-Based Immigration System*.

Faktor internasional yang kedua yaitu faktor regional. Sebelum resmi keluar dari UE, Inggris terpaksa harus terus menerima imigran dari negara tetangga karena kebijakan *Free Movement* masih berlaku. Imigran dari UE tidak membutuhkan visa untuk dapat tinggal secara bebas di Inggris. Kondisi regional Inggris yang padat oleh imigran, menimbulkan berbagai masalah seperti kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tindak kriminalitas, serta meningkatnya sentimen buruk masyarakat Inggris terhadap imigran.

Kebijakan *Points-Based Immigration System* dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada pada keadaan atau kondisi dalam negeri Inggris. Adanya *Points-Based Immigration System* akan membatasi pergerakan imigran dari UE yang sebelumnya dapat bergerak secara bebas. Imigran dari UE dan negara lain harus tunduk dan mengikuti aturan dari kebijakan imigrasi baru yang lebih ketat (The Migration Observatory, 2023). Imigran dari UE yang sebelumnya diperlakukan secara khusus akan dikenakan aturan yang sama secara adil dengan imigran dari negara-negara lain (The Migration Observatory, 2023). Masalah regional Inggris yang disebabkan oleh tingginya angka imigran mendorong keputusan pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap kebijakan luar negeri imigrasi Inggris.

Faktor Internasional yang ketiga yaitu hubungan bilateral. Kebijakan *Points-Based Immigration System* merupakan kebijakan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson dengan mengadopsi kebijakan imigrasi berbasis poin milik Australia. Hubungan bilateral Inggris dengan negara lain, mendorong perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris. Hubungan bilateral antara Inggris dan UE yang berubah setelah *Brexit* membuat Inggris tidak lagi terikat dengan kebijakan yang diterapkan oleh UE. Sebelumnya, Inggris tergabung dalam *Dublin System* oleh UE. *Dublin System* adalah sistem aturan untuk menentukan negara anggota mana yang bertanggung jawab atas permohonan suaka dalam UE (Overton, 2021). Pemohon atau pencari suaka merupakan seseorang yang statusnya belum diakui oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), berbeda dengan pengungsi yang statusnya telah diakui (Cristiana, 2021). Setelah keluar dari UE, Inggris terlepas dari *Dublin System* dan memungkinkan Inggris untuk mengadakan diskusi bilateral terkait pencari suaka dengan negara lain tanpa terikat oleh kebijakan UE. Hubungan bilateral lain yang mendorong Inggris membuat perubahan kebijakan luar negeri imigrasinya adalah Australia. Inggris memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Australia. Inggris dan Australia memiliki banyak kesamaan, terutama dalam budayanya. Meskipun begitu, hubungan bilateral antara Inggris dan Australia

tidak hanya didukung oleh warisan budaya saja, tetapi juga kesamaan pandangan kepentingan, hubungan antar masyarakat, dan hubungan kerja sama dalam berbagai sektor (Australian High Commission United Kingdom, 2019). Peristiwa *Brexit* memberikan peluang untuk mempererat hubungan kedua negara. Inggris dan Australia telah bekerja sejak 2016 untuk menentukan jangkauan negosiasi *Free Trade Agreement* setelah *Brexit* (Australian High Commission United Kingdom, 2019). Kesuksesan sistem imigrasi Australia yang ketat dan terstruktur juga mempengaruhi keputusan pemerintah Inggris untuk mengadopsi kebijakan imigrasi berbasis poin yang disesuaikan dengan kondisi Inggris yaitu *Points-Based Immigration System*.

Faktor internasional yang terakhir yaitu aktor non-negara. Aktor non-negara International Organization for Migration (IOM) memberikan rancangan strateginya terkait masalah imigran di Inggris untuk tahun 2021-2024. Kondisi Inggris yang berubah secara signifikan sejak keluar dari UE mempengaruhi kebijakan dan praktik terkait imigrasi (IOM UN Migration, 2021). Tugas dan prioritas IOM banyak terdampak oleh *Brexit* serta rencana kebijakan imigrasi Inggris yang baru (IOM UN Migration, 2021). Sebagai respon dari hal tersebut, IOM menguraikan upayanya yang memanfaatkan perubahan kondisi di Inggris untuk mewujudkan imigrasi yang tertib, aman, dan teratur selama empat tahun terhitung mulai dari tahun 2021 (IOM UN Migration, 2021). IOM Inggris selama empat tahun ke depan akan terus berperan secara aktif di bidang mobilitas manusia yang bertujuan untuk melindungi, membantu dan mendukung imigran di Inggris, mengembangkan respons yang efektif terhadap dinamika imigrasi yang mulai berubah, dan memberikan saran serta nasihat mengenai kebijakan, praktik, data, dan penelitian menyangkut migrasi (IOM UN Migration, 2021). IOM akan memastikan bahwa hak asasi manusia imigran yang ada di Inggris dilindungi.

Kesimpulan

Tingginya angka imigran di Inggris menjadi salah satu alasan utama Inggris memilih keluar dari UE (*Brexit*). Setelah resmi keluar, Inggris tidak lagi menerapkan kebijakan imigrasi *Free Movement* dan memutuskan untuk membentuk kebijakan imigrasi baru berbasis poin *Points-Based Immigration System* yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021. Alasan mengapa Inggris memutuskan untuk merubah kebijakan luar negeri imigrasi karena didorong oleh faktor-faktor domestik dan internasional Inggris. Faktor domestik birokrasi Inggris pada pemerintahan Boris Johnson yang menginginkan dan mengusahakan kebijakan imigrasi baru *Points-Based Immigration System*.

Opini masyarakat Inggris yang menginginkan sistem imigrasi baru yang lebih ketat untuk menekan angka imigran yang tinggi di Inggris. Media surat kabar *The Daily Express*

yang mendukung pemerintah Inggris dalam agendanya dan mendukung *Points-Based Immigration System*. Kelompok kepentingan NHS dan CBI, dua badan besar dengan pengaruh besar di Inggris yang membutuhkan tenaga kerja terampil (*skilled worker*) yang diutamakan dalam kebijakan imigrasi baru *Points-Based Immigration System*. Partai politik Konservatif, salah satu partai politik terbesar di Inggris yang mendukung Perdana Menteri Boris Johnson dalam keputusannya untuk menetapkan *Points-Based Immigration System*. Faktor Internasional seperti faktor global di mana Inggris terjebak dalam situasi sulit atas *over* populasi imigran dari UE dan negara-negara lain yang tinggal dan menetap di Inggris.

Faktor kondisi regional Inggris yang tidak stabil dengan banyaknya imigran dan sentimen negatif masyarakat Inggris terhadap imigran yang meningkat. Hubungan bilateral Inggris dan UE yang memburuk pasca *Brexit*, memberi kesempatan dan kewenangan penuh pada Inggris untuk membuat kebijakan baru termasuk kebijakan imigrasi *Points-Based Immigration System*. Serta hubungan bilateral Inggris dan Australia yang membuat Perdana Menteri Boris Johnson mengadopsi kebijakan imigrasi berbasis poin milik Australia yang direalisasikan melalui kebijakan *Points-Based Immigration System*. Peran aktor non-negara seperti IOM yang membantu memberikan strategi terkait masalah imigran di Inggris pasca *Brexit*, serta upayanya untuk terus membantu Inggris setelah kebijakan imigrasinya berubah. Faktor-faktor tersebut merupakan alasan mengapa Inggris memutuskan untuk membuat perubahan pada kebijakan luar negeri imigrasinya menjadi *Points-Based Immigration System*. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang akan menyempurnakan penelitian ini, terutama pada aspek kebaruan data yang akan membantu peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitian. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Alunaza SD, H. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Masalah Imigrasi. *Intermestic: Journal of International Studies*, 156-170.
- Cristiana, E. (2021). Perlindungan terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-16.
- Eidenfalk, J. (2006). Towards a new model of foreign policy change. *University of Wollongong Research Online*, 1-11.

- Hangartner, D., & Spirig, J. (2024). Immigration and inequality: the role of politics and. *Oxford Open Economics*, 1481-1486.
- Putra, I. D., Susanti, S., & Dewi, P. R. (2019). Dampak Referendum Brexit terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris. 1-12.
- Yurisman, H. (2024). Perubahan Kebijakan Imigrasi Open Door menjadi Kebijakan Point Based System Inggris di Tahun 2016-2023. 1-31.
- Euro News. (2020, January 30). *Brexit Timeline 2016–2020: key events in the UK’s path from referendum to EU exit*. Retrieved from Euro News: <https://www.euronews.com/2020/01/30/brexit-timeline-2016-2020-key-events-in-the-uk-s-path-from-referendum-to-eu-exit>
- The i Paper. (2019, July 25). *Boris Johnson promises ‘radical’ immigration change to copy ‘Australian-style’ points system in first Commons speech*. Retrieved from INews UK: <https://inews.co.uk/news/politics/boris-johnson-first-commons-speech-immigration-points-based-system-318353>
- IOM UN Migration. (2021). *IOM United Kingdom Strategy*. London: International Organization for Migration .
- Australian High Commission United kingdom. (2019). *Australia and the UK*. Retrieved from Australian High Commission United kingdom: <https://uk.embassy.gov.au/lhlh/australia.html>
- CBI. (2020, February 26). *New immigration system includes key elements of CBI campaigning efforts*. Retrieved from CBI: <https://www.cbi.org.uk/articles/new-immigration-system-includes-key-elements-of-cbi-campaigning-efforts/>
- CBI. (2025). *The CBI - About Us*. Retrieved from CBI: <https://www.cbi.org.uk/about-us/>
- Global HR Lawyers. (2020, January 9). *What a Conservative Government means for UK immigration law*. Retrieved from Global HR Lawyers Ius Laboris: <https://iuslaboris.com/insights/what-a-conservative-government-means-for-uk-immigration-law/>
- GOV UK. (2022, February 25). *The UK's points-based immigration system: an introduction for employers (accessible version)*. Retrieved from GOV.UK: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers#graduate-route>
- Morris, A. (2025, February 12). *The UK Points Based System: A Guide*. Retrieved from Davidson Morris: https://www.davidsonmorris.com/points-based-system/#elementor-toc_heading-anchor-0
- NHS Employers. (2024, May 16). *Immigration and the skilled worker recruitment process*. Retrieved from NHS Employers: <https://www.nhsemployers.org/articles/immigration-and-skilled-worker-recruitment-process>
- NHS Employers. (2025, January 17). *Impacts of the changes to the UK immigration policy*. Retrieved from NHS Employers: <https://www.nhsemployers.org/articles/impacts-changes-uk-immigration-policy>
- NHS England. (2025). *What we do*. Retrieved from NHS England: <https://www.england.nhs.uk/about/what-we-do/>

- Overton, S. (2021, July 29). *UK asylum policy after Brexit*. Retrieved from UK in a Changing Europe: <https://ukandeu.ac.uk/explainers/asylum-policy-after-brexit/>
- Spartacus Educational. (2020, January). *The Daily Express*. Retrieved from Spartacus Educational: <https://spartacus-educational.com/Jexpress.htm>
- Stephens Scown. (2021, February 10). *Conservative New Immigration Policy – Points Based Immigration*. Retrieved from Stephens Scown: <https://www.stephens-scown.co.uk/immigration/new-immigration-system-proposed-by-the-conservative-party/>
- The European Union. (2025). *Easy to read - The European Union*. Retrieved from The European Union: https://european-union.europa.eu/easy-read_en?wt-search=yes
- The Migration Observatory. (2023, November 20). *The Migration Observatory informs debates on international migration and public policy*. Retrieved from The Migration Observatory: <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/>
- The Migration Observatory. (2025, January 25). *UK Public Opinion toward Immigration: Overall Attitudes and Level of Concern*. Retrieved from The Migration Observatory: <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/uk-public-opinion-toward-immigration-overall-attitudes-and-level-of-concern/>